

POLITIK

**Desak Usut Tuntas Korupsi
BNPB, Rieke Diah Pitaloka:
Ini Kejahatan Kemanusiaan!**

Halaman 2

NASIONAL

**Dua Hari Usai Blackout Batam,
Darmawan Prasodjo Dicapot
dari Dirut PLN**

Halaman 5

HARIAN MERDEKA

KAMIS, 15 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE

www.harian-merdeka.com



Forum Pimred Desak Presiden Mundur

Soal Belum Selesai Asap Akibat Karhutla

ACEH | Harian Merdeka – Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), Bernadus Wilson Lumi, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Ia bahkan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mundur jika hingga akhir Oktober 2026 kabut asap belum juga hilang dari Bumi Pertiwi. Hal itu disampaikan Wilson usai melantik pengurus Forum Pimred Multimedia Prov Aceh, Di Aula Gubernur Aceh, Rabu (14/10).

Halaman 11

Dampak Karhutla Papua Tembus NTT, DPR Minta Kemenhut Tak Cuma Diam

JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Menteri Raja Juli Antoni untuk segera mengambil langkah konkret dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Papua.

Desakan ini disampaikan setelah sebaran asap dari karhutla Papua dilaporkan telah meluas hingga ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan mengganggu kelancaran penerbangan. Usman menjelaskan, penyebaran kabut asap yang terbawa angin timur tersebut membuktikan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan di area sekitar titik api, tetapi juga menjangkau daerah tetangga yang berada cukup jauh.

Ia mencontohkan, penerbangan pesawat rute Kupang-Kalabahi dilaporkan gagal mendarat di Kalabahi akibat pekatnya kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut.

"Kementerian Kehutanan harus mengambil langkah konkret dengan segala upaya yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Papua. Asapnya sudah menyebar sampai Alor, NTT, akibat terbawa angin timur," ujar Usman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Menurut Usman, situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat karena dampaknya telah mengancam keselamatan dan kelancaran transportasi udara.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Kemenhut, khususnya dalam memperkuat langkah antisipasi dan pencegahan dini agar kebakaran tidak semakin meluas dan berulang.

Laporan BNPB: Karhutla Tersisa 639 Hektare

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa luas karhutla yang masih ditangani satgas di lapangan kini tersisa 639,23 hektare. ● (Egi)



Desak Usut Tuntas Korupsi BNPB, Rieke Diah Pitaloka: Ini Kejahatan Kemanusiaan!

JAKARTA |
Harian Merdeka

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengemukakan keras dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di tengah upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah, dugaan penyelewengan anggaran kebencanaan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026, BNPB memegang mandat krusial sebagai leading sector dalam mengoordinasikan penanganan karhutla secara nasional. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemadaman api, penyelamatan ekosistem, serta perlindungan kesehatan warga dari kepungan asap beracun, justru diduga disalahgunakan demi kepentingan segelintir oknum.

Penyelewengan anggaran krisis ini bersinggungan langsung dengan bidang kerja Komisi XIII DPR RI yang mengawal Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perspektif kemanusiaan, tindakan



ini dinilai sebagai pelanggaran HAM sistemik karena merampas hak hidup serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sementara dari aspek hukum, skandal ini menelanjangi celah fatal dalam tata kelola anggaran darurat yang memerlukan evaluasi legislasi dan pengawasan ketat.

Atas dasar itu, Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak agresif dan menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati.

Ia meminta penegak hukum menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta memperluas penyidikan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Pasal 20 UU Tipikor guna menjaring aktor intelektual hingga korporasi vendor yang terlibat.

Dalam desakannya, Rieke menekankan beberapa poin krusial:

Digitalisasi dan Transparansi Radikal Anggaran Darurat: Mendesak reformasi regulasi pengadaan barang dan jasa khusus kebencanaan wajib menggunakan sistem real-time tracking yang dapat diakses publik untuk menutup celah manipulasi dana siap pakai.

Audit Performa Operasional Karhutla: Melakukan audit kelembagaan secara menyeluruh terhadap BNPB untuk memastikan skandal ini tidak melumpuhkan atau mengurangi efektivitas pemadaman karhutla yang sedang berjalan di daerah. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko: Saya Sosialis, Tapi Tak Masalah dengan Kapitalisme

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tokoh aktivis 1998 Budiman Sudjatmiko mengaku tidak anti terhadap kapitalisme meskipun memposisikan dirinya sebagai seorang sosialis.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) tersebut mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan dengan nilai-nilai positif yang ada dalam kapitalisme. Menurutnya, sistem kapitalisme mampu mendorong munculnya inovasi, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan (entrepreneurship).

“Kapitalisme memungkinkan adanya entrepreneurship, ada insentif model, model imbalan yang proporsional,” ujar Budiman seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya @masbud_sudjatmiko, Rabu (14/10/2026).

Budiman menegaskan tidak permasalahan kapitalisme selama iklim persaingan yang berjalan tetap sehat.

“Saya enggak masalah dengan kapitalisme. Kapitalisme bisa mendorong kreativitas, inovasi, kewirausahaan, kompetisi

yang sehat. Oke, saya enggak masalah. Saya orang sosialis, tapi saya enggak bermasalah dengan kapitalisme,” jelas mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) tersebut.

Meskipun begitu, Budiman secara tegas membedakan antara kapitalisme dan imperialisme. Ia menegaskan sangat menentang imperialisme karena sistem tersebut dinilai menindas pihak yang lemah dan tidak memberikan ruang untuk berdiri di atas kaki sendiri.

“Imperialisme itu adalah membuat kamu tetap ada di bawah telapak kakiku. Kamu tidak boleh berdiri lebih tinggi dari aku. Kamu tidak boleh berdiri tegak, kepalamu di atas lututku. Kamu harus tetap di bawah lututku. Itu imperialisme,” tegasnya.

Berbeda dengan imperialisme, Budiman menilai kapitalisme justru membuka peluang bagi setiap pihak untuk berkompetisi dan meraih kesuksesan yang lebih tinggi.

“Kalau kapitalisme, ‘Ayo, kalau kamu bisa melompat lebih tinggi, enggak apa-apa. Nanti gua juga mau berlatih lagi untuk



melompat lebih tinggi dari kamu,” tuturnya.

Mengenai alasannya memilih jalan sosialisme, Budiman menjelaskan bahwa sosialisme berfokus pada jaminan kesejahteraan dan memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang kesulitan untuk mengubah nasibnya menjadi

lebih baik.

“Kesejahteraan. Karena ada orang-orang yang memang agak susah melompat nih, yang harus kita ajak nih. Nah, itu pilihan saya menjadi sosialis. Tapi saya tidak masalah dengan kapitalisme. Saya permasalahan imperialisme,” pungkasnya.

● (Egi)

SBY Tegaskan Negara Harus Di Atas Kepentingan Partai, Sentil Mantan Presiden yang Masih Bermanuver Politik

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan para elite politik, termasuk mantan presiden, agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.

SBY menyayangkan apabila figur yang pernah menduduki jabatan tertinggi di Indonesia masih terlibat dalam manuver politik praktis hingga terseret dalam pusaran konflik elektoral.

Menurut SBY, status sebagai mantan presiden tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai negarawan. Predikat tersebut harus dibuktikan



melalui sikap, pemikiran, dan tindakan yang mengutamakan kepentingan nasional.

“Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (negara di atas partai, negara yang utama),” tegas SBY.

Ia juga mengingatkan bahwa para mantan pejabat tinggi negara semestinya mampu menunjukkan keteladanan dalam kehidupan demokrasi.

Pengalaman memimpin negara, kata-kata dan sikap politik mereka seharusnya menjadi modal untuk menjaga persatuan, bukan justru memperuncing persaingan politik.

SBY menegaskan, kepentingan kelompok maupun partai tidak boleh mengalahkan kepentingan republik. Sebaliknya, para elite politik harus mampu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah politiknya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak

semata-mata berbicara tentang perebutan kekuasaan dan kemenangan elektoral. Lebih dari itu, demokrasi menuntut kedewasaan politik, tanggung jawab kebangsaan, serta komitmen untuk menjaga kepentingan nasional di atas ambisi pribadi maupun kelompok.

Catatan redaksi: Untuk memperkuat akurasi berita, perlu ditambahkan konteks kapan dan di mana pernyataan SBY disampaikan serta siapa atau persoalan politik apa yang menjadi sasaran kritiknya.

Tanpa konteks tersebut, pernyataan ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa SBY sedang menyindir mantan presiden tertentu. ● (Agus)

Bupati Gowa Sitti Husniah Resmi Diberhentikan Tidak Hormat oleh Mendagri

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan penerbitan SK keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut.



eri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut.

"Iya betul, SK Mendagri tertanggal 14 Oktober memutuskan

memberhentikan saudari HT sebagai Bupati Gowa secara tidak terhormat," kata Hasrul kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Menindaklanjuti pemberhentian tersebut, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, untuk bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa periode 2024–2029.

"Menunjuk DM sebagai pelaksana tugas bupati. Mulai berlaku

dari keluarnya SK ini tertanggal 14 Oktober," jelasnya.

Meski demikian, Hasrul menyampaikan bahwa jajaran DPRD Kabupaten Gowa secara fisik baru akan menerima dokumen SK tersebut dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Tetapi DPRD Gowa insyaallah baru besok akan ke kantor Pemprov Sulsel menerima secara resmi SK fisiknya," ujarnya.

● (Egi)

Dua Hari Usai Blackout Batam, Darmawan Prasodjo Dicapot dari Dirut PLN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dua hari setelah pemadaman listrik total (blackout) melanda kawasan Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo resmi diganti.

Pergantian Darmawan, yang akrab disapa Darmo, diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) pada Rabu (14/10/2026) malam.

Melalui RUPS tersebut, Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PLN yang baru. Suroso sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.

Keputusan pergantian pucuk pimpinan ini dibenarkan oleh Komisaris Independen PLN, Andi Arief.

"Iya, pergantian Dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujar Andi Arief.

Pergantian pimpinan ini terjadi saat masyarakat di Kepulauan Riau masih mengalami dampak gangguan



kelistrikan yang melanda sejak Senin (12/10/2026). Blackout tersebut menyebabkan pemadaman listrik selama belasan jam di Batam, serta berimbas ke Bintan dan Tanjungpinang yang terhubung melalui sistem interkoneksi kelistrikan.

Bahkan hingga Rabu (14/10/2026) pagi, sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan dilaporkan belum mendapatkan pasokan listrik secara normal. Selain itu, pemadaman listrik turut melumpuhkan layanan distribusi air bersih dan jaringan

telekomunikasi.

Pihak PLN Batam sebelumnya mengonfirmasi bahwa insiden blackout dipicu oleh seekor monyet liar yang masuk ke kawasan Gardu Induk 150 kV Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Batam.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan secara langsung keputusan pergantian Darmawan Prasodjo dengan insiden pemadaman listrik di Kepulauan Riau.

Darmawan Prasodjo diketahui

telah menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 6 Desember 2021. Sementara itu, Suroso Isnandar kini memimpin PT PLN (Persero) dan untuk sementara masih merangkap jabatan lamanya hingga pengganti resmi ditunjuk.

Pergantian pimpinan ini menjadi sorotan utama di tengah dorongan publik agar keandalan sistem pasokan listrik di wilayah Batam, Bintan, dan Tanjungpinang dapat segera diperbaiki secara menyeluruh.

● (Egi)

“Iya, pergantian Dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,”

Andi Arief
Komisaris Independen PLN

Advokat Soroti Kasus Korupsi Upah Pungut Bogor: KPK Jangan Biarkan Mangkrak



BOGOR |
Harian Merdeka

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., menyuarakan perhatiannya terhadap perkembangan penanganan dugaan kasus korupsi upah pungut di Bogor yang dinilai berjalan lambat dan minim informasi publik. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait tahapan proses hukum yang sedang dijalani.

Sorotan itu muncul setelah KPK melakukan penyitaan uang sekitar Rp1,5 miliar, penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan, serta pemeriksaan terhadap beberapa pejabat terkait perkara tersebut. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Wildan Ansori Nasution, perkara yang berkaitan dengan penyimpanan keuangan publik seharusnya dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara, selama informasi yang disampaikan

kan tidak mengganggu proses penyidikan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Karena ini kasus dugaan korupsi, persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakjelasan. KPK perlu memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi upah pungut di Bogor, termasuk status penanganannya, langkah hukum yang telah dilakukan, serta kendala apa yang menyebabkan sampai saat ini belum ada tersangka,” ujar Wildan dalam keterangan persnya.

Wildan menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap perkara, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum, kepastian proses, dan pertanggungjawaban lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Sebagai advokat yang fokus pada gerakan anti-kleptokrasi, ia menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan publik harus ditangani secara serius dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak mendahului putusan pen-

gadilan.

“Yang kita minta adalah kejelasan, bukan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Apabila perkara ini masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, KPK perlu menyampaikan informasi yang dapat dibuka kepada publik. Apabila terdapat kendala atau perkembangan tertentu, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta KPK memastikan setiap laporan dan dugaan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti secara profesional, tanpa diskriminasi, serta didasari alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wildan mengingatkan bahwa ketidakjelasan informasi yang berlangsung terlalu lama dapat menimbulkan pertanyaan publik terhadap arah dan kepastian penanganan perkara, sehingga komunikasi kelembagaan yang terbuka menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan pendengar adanya dugaan perkara korupsi saja, tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya. KPK perlu menjawab pertanyaan publik melalui penjelasan resmi yang transparan, berdasarkan fakta, dan tidak menimbulkan spekulasi serta asumsi liar yang berkembang di masyarakat umum,” tutup Wildan Ansori Nasution. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait seruan tersebut.

● (Egi)

Usut Korupsi Tambang Batubara PT CCM, Kejagung Periksa Pejabat Kementerian ESDM



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung terus mendalami penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan batu bara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk kurun waktu tahun 2013 hingga 2025.

Pada Rabu (14/10/2026), penyidik memeriksa empat orang saksi guna memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara tersebut.

Adapun keempat saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik yakni:

- TS, mewakili pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Y, mewakili pihak Kementerian ESDM;
- QFE, mewakili pihak Kementerian ESDM;
- FMT, selaku perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mendalami materi perkara, memperkuat alat bukti, serta melengkapi berkas penyidikan yang sedang berjalan.

Kejaksaan Agung menegaskan seluruh proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ● (Egi)

Lelang Batu Bara Samin Tan, Kejagung Buka Harga Limit Rp263 Miliar

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI melaksanakan lelang benda sitaan berupa komoditas batu bara milik tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Samin Tan. Total aset yang dilelang mencapai 171.107 ton batu bara.

Pengumuman lelang tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman Lelang Nomor: B-2822/BPA.2/BPAPm.1/10/2026 yang dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Seluruh objek lelang ditawarkan

kan dalam satu lot dengan nilai limit sebesar Rp263.080.879.000 (Rp263,08 miliar). Sementara itu, peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan penawaran sebesar Rp130 miliar.

Objek barang bukti tersebut berada di area Jetty PT AC, Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, serta di atas 15 unit kapal tongkang di perairan

sekitarnya.

Pelaksanaan lelang diselenggarakan secara elektronik menggunakan metode penawaran terbuka (open bidding) melalui portal resmi www.lelang.go.id. Kualifikasi peserta lelang dibatasi khusus untuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki NPWP serta perizinan di bidang pertambangan/energi yang sah.

Samin Tan sendiri ditetapkan

sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT AKT. Ia diduga tetap menjalankan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah dicabut sejak tahun 2017, hingga memicu potensi kerugian keuangan negara yang bernilai fantastis. ● (Egi)

KPK Tahan 5 Tersangka Korupsi BNPB, Salah Satunya Adik Kepala BNPB

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terungkap merupakan adik kandung dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yakni Bima Setyawan.

Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyananto.

“Ya, terinformasi seperti itu [adik Kepala BNPB], tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak me-



lihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu (14/10).

Selain Bima, KPK menetapkan

kan empat tersangka lainnya dalam kasus ini. Berdasarkan sumber internal, mereka adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RCH, serta dua orang dari pihak swasta berinisial G dan S.

Setyo menjelaskan, kasus korupsi di lingkungan BNPB tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta.

“Dari dana siap pakai itu kan

melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian dialami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” ujarnya.

Kelima tersangka tersebut telah resmi ditahan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu sore.

● (Egi)

Update Ledakan Cimanggis Tangsel: 2 Meninggal Dunia, 11 Korban Luka



JAKARTA |
Harian Merdeka

Ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, menewaskan dua orang dan menyebabkan sekitar 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

Polisi memastikan ledakan tersebut bukan berasal dari bom, sementara penyebab pasti kejadian masih diselidiki.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condoro mengatakan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri, Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan Polres Tangerang Selatan.

"Dari hasil olah TKP sementara, ini bukan bom, tetapi ledakan yang masih kami dalam penyebabnya," kata Susatyo kepada awak media, Kamis (15/10).

Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan sebuah tabung etilen berukuran 52 kilogram di lokasi kejadian. Gas etilen lazim digunakan untuk memban-

tu proses pematangan buah.

Polisi juga menemukan sejumlah tabung di luar lokasi kejadian. Namun, penyidik belum menyimpulkan keterkaitan temuan tersebut dengan penyebab ledakan.

Selain itu, petugas menemukan tumpukan buah pisang yang masih mentah di area ruko yang mengalami kerusakan paling parah. Berdasarkan keterangan saksi, lokasi tersebut digunakan untuk kegiatan pengemasan buah yang akan didistribusikan ke sejumlah pasar.

Penyidik masih mendalami seluruh temuan di lokasi untuk memastikan sumber dan penyebab ledakan.

Olah TKP Dilanjutkan

Susatyo mengatakan olah TKP belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena kondisi di lokasi tidak memungkinkan pemeriksaan lanjutan pada malam hari.

Karena itu, pemeriksaan dihentikan sementara dan dijadwalkan dilanjutkan pada pagi hari dengan melibatkan tim gabungan dari Puslabfor Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangerang Selatan.

Polisi juga menjadwal-

kan pemeriksaan terhadap lima orang saksi di Polres Tangerang Selatan untuk menggali informasi mengenai aktivitas di lokasi sebelum ledakan terjadi.

Dampak ledakan menyebabkan kerusakan pada empat blok ruko berlantai dua. Polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk kemungkinan keterkaitan penggunaan gas di gudang penyimpanan buah tersebut.

Dua Tewas, 11 Luka-luka

Berdasarkan pendataan sementara, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

Para korban luka mendapatkan penanganan medis di tiga fasilitas kesehatan, yakni Rumah Sakit Sari Asih, Rumah Sakit Insan Permata, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan.

Polisi masih melengkapi pendataan korban dan mengumpulkan keterangan saksi. Hasil olah TKP lanjutan serta pemeriksaan laboratorium forensik diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti ledakan di gudang penyimpanan buah tersebut.

● (Egi)



Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Amankan Pria Pengedar 30 Cartridge Etomidate Ilegal

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AB (40) yang diduga terlibat dalam peredaran 30 cartridge berisi zat yang diduga etomidate di wilayah Tangerang, Banten, dan Jakarta Barat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 16.35 WIB. Penindakan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba di kawasan Karang Tengah, Kota Tangerang.

"Tim Opsnal Unit 5 Subdit 3 mendapatkan info dari masyarakat sering adanya transaksi narkoba di Jalan H. Mean Ujung, Karang Tengah, Kota Tangerang dan melakukan pengembangan," kata Bismo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Unit 5 Subdirektorat 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pemantauan dan pemetaan lokasi. Petugas kemudian mengamankan AB di pinggir Jalan H. Mean Ujung, Karang Tengah, Kota Tangerang.

Saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidate. Penyelidikan kemudian dikembangkan ke rumah kos yang ditempati tersangka di Jalan Bunga, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.

Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan cartridge serupa. Dengan demikian, total barang bukti yang disita mencapai 30 cartridge.

Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon seluler, tas belanja berwarna biru, paket, pot bunga, dan satu bungkus makanan yang ditemukan dalam rangkaian pengungkapan tersebut.

Bismo mengatakan, penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa tersangka dan saksi. Polisi juga mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Untuk memastikan kandungan zat di dalam cartridge, barang bukti akan dikirim ke laboratorium forensik guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. ● (Egi)

UMMI QUARY SELALU PATUHI ATURAN IBU, TOLAK ADEGAN MESRA DI FILM

JAKARTA |
Harian Merdeka

Aktris sekaligus komedian, Ummi Quarry, kini semakin melebarkan sayapnya di industri perfilman layar lebar Tanah Air. Meskipun tawaran akting terus berdatangan, bintang film *People Pleaser* itu tetap memegang teguh batasan yang ditetapkan oleh sang ibunda.

Ummi Quarry mengungkapkan sang ibunda selalu mendampingi secara langsung dalam setiap kegiatannya di industri hiburan. Kehadiran ibunda diakui menjadi pilar pendukung utama dalam perjalan-

nan kariernya dari awal hingga saat ini.

"Mau setiap ada acara besar maupun kecil akan selalu aku ikut sertakan," kata Ummi Quarry saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Keterlibatan ibunda tidak hanya sebatas menemani di berbagai acara, melainkan juga ikut mengawasi tawaran peran yang masuk. Ia mengaku selalu berdiskusi dan meminta pertimbangan ibunya sebelum menyetujui sebuah skenario.

Dalam proses tersebut, ibundanya memiliki sejumlah pakem tegas yang tidak boleh dilanggar. Salah satu yang

ditekankan adalah larangan mengambil adegan yang terlalu mesra atau kontak fisik intim dengan lawan main.

"Pasti, pasti, pasti curhat. Jadi kalau Mama kan ada pakem-pakemnya, hal yang gak boleh diambil, misalkan adegan yang terlalu intim sama lawan main," terangnya.

Mantan pemain *Lenong Bocah* ini menegaskan dirinya sama

sekali tidak merasa terkekang oleh aturan tersebut.

Ia justru menerima setiap batasan yang

diberikan keluarga dengan lapang dada.

"Ya aku sih enggak apa-apa, selagi kan restunya Mama juga restunya Tuhan," ujarnya.

Di luar batasan adegan fisik, Ummi Quarry tetap berupaya memberikan totalitas penuh terhadap setiap karakter baru yang dipercayakan kepadanya.

"Lumayan agak beban di akunya sendiri, tapi itu tanggung jawab besar ya. PH dan sutradara, atau bahkan penulis juga mempercayakan aku di karakternya tersebut," pungkasnya. **(dth)**



Industri Tertekan Impor dan Bahan Baku, Menperin Turun Tangan Siapkan Proteksi

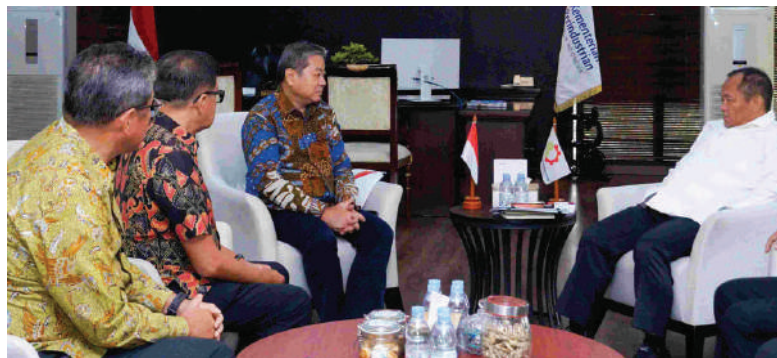
JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji mencari solusi atas persoalan harga bahan baku yang dihadapi industri makanan dan minuman serta tekanan produk impor terhadap industri baja nasional. Langkah itu dibahas dalam pertemuan dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Rabu (14/10/2026).

Sarmuji mengatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat daya saing industri manufaktur melalui penyediaan bahan baku yang kompetitif dan perlindungan terhadap industri strategis. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan pelaku usaha.

“Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi,” katanya di Jakarta.

Menurut Sarmuji, industri makanan dan minuman nasional memiliki daya saing yang cukup kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan positif dan



kemampuan produk dalam negeri menembus pasar ekspor. Namun, persoalan ketersediaan dan harga bahan baku masih perlu mendapat perhatian.

Salah satu masalah yang disampaikan GAPMMI adalah tingginya harga beras pecah sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk bihun. Sarmuji menyebutkan, harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700-Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif,” ujarnya.

Salah satu opsi yang dijabari pemerintah adalah memanfaatkan stok beras Perum Bulog un-

tuk memenuhi kebutuhan industri. Menurut Sarmuji, langkah ini berpotensi membantu pelaku usaha memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi beras yang berisiko mengalami penurunan kualitas akibat penyimpanan.

"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini," ungkapnya.

Di sektor baja, Sarmuji menyoroti tekanan persaingan dari produk impor yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Ia menilai industri baja sebagai sektor strategis perlu memperoleh perlindungan melalui instrumen kebijakan yang tepat.

“Untuk industri strategis

seperti baja, tentu perlu ada proteksi, baik melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, proteksi saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan daya saing industri agar semakin tangguh menghadapi persaingan global,” tegasnya.

Sarmuji menekankan, kebijakan perlindungan industri dalam negeri harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sebab, proteksi memiliki keterbatasan sehingga pelaku industri tetap perlu memperkuat kemampuan bersaing secara berkelanjutan.

GAPMMI Dorong Kepastian Bahan Baku

Ketua GAPMMI, Adhi S. Lukman mengapresiasi keterbukaan Sarmuji dalam menerima masukan dari pelaku industri makanan dan minuman. Salah satu persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kepastian ketersediaan bahan baku.

“Memenuhi bahan baku diperlukan untuk menjaga daya saing industri sekaligus memastikan produk makanan dan minuman tetap terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap penetapan neraca komoditas untuk bahan baku seperti gula, garam, jagung, dan daging dapat dipercepat agar kebutuhan industri pada awal 2027 dapat terpenuhi,” ujar Adhi.

Iklan Mini Merdeka

Pasang Iklannya Disini....!

Telp/Fax : (021) 59728637 | harianmerdekaredaksi@gmail.com

MEDIA TEPAT UNTUK PROMOSI BISNIS ANDA

Properti

Otomotif

Lowongan Kerja

Jasa & Servis

Jual Beli

Lain-lain

DPRD Tangsel Desak WTP Serpong Lagoon Disegel, Lebih dari 100 Warga Terdampak Gangguan Pencernaan

TANGSEL | **Harian Merdeka**

Persoalan kualitas air bersih di Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kian menjadi sorotan. DPRD Tangsel mendesak pemerintah kota mengambil tindakan tegas terhadap pengelola instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) yang diduga menyalurkan air tidak layak kepada warga.

Desakan tersebut muncul setelah lebih dari 100 penghuni perumahan dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, termasuk muntaber dan diare. Warga sebelumnya juga mengeluhkan kondisi air yang diduga tercemar, bahkan disebut menemukannya cacing dan jentik.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (14/10/2026), Komisi I dan Komisi II menerima langsung keluhan warga sekaligus membahas langkah penanganan atas persoalan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda, mengungkapkan bahwa persoalan kualitas air di Serpong Lagoon bukan kali pertama dikeluhkan warga.

Menurut dia, pengelola disebut telah beberapa kali meminta maaf, tetapi masalah yang sama kembali terjadi.

Dugaan Tak Berizin, DPRD Minta WTP Disegel

Ricky menyoroti dugaan belum lengkapnya perizinan operasional WTP Serpong Lagoon. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, pengelola sebelumnya telah diingatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Tangsel untuk mengurus perizinan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Namun, menurut Ricky, persoalan perizinan tersebut diduga belum diselesaikan.

"WTP ini tidak memiliki izin. Bahkan sudah diingatkan oleh DCKTR Kota Tangsel untuk segera mengurus perizinan ke BBWSCC di Cawang, ternyata tidak diurus juga sampai sekarang



tidak ada izin," tegas Ricky.

DPRD juga menyoroti dugaan sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni perumahan. Dalam RDP, muncul informasi bahwa air diduga berasal dari danau bekas galian pasir di sekitar kawasan.

Dugaan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan penelusuran dokumen oleh instansi berwenang, termasuk untuk memastikan sumber air dan proses pengolahannya memenuhi persyaratan kesehatan.

Ricky menegaskan, pengelola WTP dan pengembang harus bertanggung jawab atas persoalan yang dialami warga. Ia bahkan mendorong penghuni perumahan mempertimbangkan gugatan perdata apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang memadai.

"Saya usulkan kepada warga agar dituntut WTP-nya, bahkan harus ada tuntutan ganti rugi perdata dan perbaikan air," ujarnya.

Menurut Ricky, warga membayar tagihan air sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Karena itu, ia menilai kualitas air dan pelayanan yang diterima masyarakat harus sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.

Diduga Mengandung E. coli
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Tangsel, Rizki Jonis, menyampaikan bahwa hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup yang

dipaparkan dalam pembahasan mengindikasikan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli) pada air di kawasan tersebut.

Bakteri E. coli tertentu dapat menjadi indikator pencemaran tinja. Keberadaannya dalam air yang digunakan untuk konsumsi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penanganan sesuai standar kesehatan.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena warga sebelumnya melaporkan gangguan kesehatan, termasuk diare dan muntaber. Meski demikian, hubungan langsung antara kualitas air dan seluruh kasus penyakit yang dilaporkan tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan epidemiologis dan bukti laboratorium.

Rizki mengatakan, Komisi I meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan tindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menghentikan operasional WTP apabila dasar hukum dan hasil pemeriksaan mendukung langkah tersebut.

"Komisi I meminta Dinkes dan DLH agar merekomendasikan kepada Satpol PP untuk segera menyegel WTP yang ada sampai pengelola WTP memperoleh izin," ujar Rizki.

Selain penindakan terhadap instalasi pengolahan air, DPRD meminta pengembang memperbaiki sistem pengolahan dan distribusi air agar sesuai dengan standar kualitas berdasarkan peruntukannya.

Pengembang Tak Hadir dalam RDP

Dalam rapat tersebut, pihak pengembang Serpong Lagoon disebut tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai keluhan warga.

Rizki menyatakan DPRD akan kembali memanggil pengembang bersama pengelola WTP agar persoalan perizinan, sumber air, dan kualitas air yang didistribusikan dapat dijelaskan secara langsung.

"Karena pihak pengembang juga sebenarnya kita panggil agar bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan warga, tetapi mereka tidak hadir. Dan akan kita panggil lagi nanti," ungkapnya.

Ketidakhadiran tersebut membuat DPRD berencana melanjutkan pembahasan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Klarifikasi pengembang dan pengelola WTP diperlukan agar penanganan persoalan ini tidak hanya berhenti pada keluhan warga dan rekomendasi dalam rapat.

Warga Butuh Air Bersih Darurat

Di tengah proses pemeriksaan dan tindak lanjut administratif, DPRD Tangsel juga meminta pemerintah daerah menyiapkan solusi darurat untuk menjamin kebutuhan air bersih warga Serpong Lagoon.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah memasok air bersih menggunakan mobil tangki melalui Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) bersama pemerintah daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar penghuni tidak terus bergantung pada pasokan air yang kualitasnya masih dipersoalkan.

Pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memastikan hasil pengujian kualitas air dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, termasuk sumber pengambilan sampel, parameter yang diperiksa, dan rekomendasi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

● (Agus)

FORUM PIMRED

Wilson menilai, berlarut-larutnya persoalan kabut asap di Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), dan sejumlah wilayah Kalimantan menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan serta efektivitas penanganan karhutla oleh pemerintah.

“Kalau sampai akhir Oktober kabut asap ini tidak juga hilang, Presiden harus berani bertanggung jawab. Kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, mundur saja,” tegas Wilson dalam pernyataannya beberapa saat tibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, Rabu (14/10/2026).

Dikatakannya, masyarakat di wilayah terdampak sudah terlalu lama menghadapi persoalan asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Di Riau, kabut asap dilaporkan muncul sejak Agustus lalu. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan telah berlangsung sejak Juli. Jambi dan Sumatera Selatan juga masih menghadapi penanganan karhutla di sejumlah lokasi.

Wilson menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke Riau pada akhir Agustus lalu. Menurut dia, kunjungan tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat langkah konkret pemerintah dalam mengatasi karhutla. Namun, persoalan asap yang masih terjadi hingga Oktober dinilainya menunjukkan bahwa penanganan harus dievaluasi secara menyeluruh.

Menurut Wilson, ketegasan pemimpin menjadi faktor penting agar penanganan kebakaran tidak berhenti pada pemadaman di lapangan, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

Ia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah saat ini dalam memastikan seluruh jajaran terkait bekerja efektif mengatasi persoalan tersebut.

“Sepertinya ada yang salah dalam penanganan sekarang. Presiden harus menunjuk-

kan ketegasan dan keseriusan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena persoalan yang berulang,” ujarnya.

Wilson juga mendesak Presiden mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dalam pengendalian karhutla. Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup jajaran kepolisian dan TNI yang terlibat dalam penanganan di daerah, sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan pemilik modal atau pihak lain dalam pembakaran hutan dan lahan. Apabila terbukti bersalah melalui proses hukum, para pelaku harus dijatuhi sanksi tegas agar menimbulkan efek jera.

“Kalau memang ada cukong yang terlibat, jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Asap Dinilai Mengancam Masa Depan Anak

Lebih jauh, Wilson mengingatkan bahwa bahaya kabut asap tidak boleh diukur hanya dari gangguan yang terlihat saat ini. Paparan polusi udara akibat kebakaran dapat menimbulkan dampak kesehatan, khususnya terhadap sistem pernapasan, dan risikonya perlu mendapat perhatian serius.

Ia mengibaratkan kabut asap sebagai racun yang dampaknya dapat terakumulasi dan baru dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, anak-anak yang terpapar asap harus mendapat perlindungan khusus.

Ditegaskannya, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampak kesehatan semakin meluas untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Penanganan harus dilakukan sejak sumber kebakaran, pengendalian asap, hingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

“Jangan ada pembiaran. Presiden sebagai kepala negara harus turun tangan dan memastikan seluruh instrumen pemerintah bekerja. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas,” katanya.

BNPB dan BMKG Catat Karhutla Masih Berlangsung

Di tengah kritik tersebut, data pemerintah menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar di sejumlah wilayah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan situasi pada akhir September 2026, mencatat kebakaran masih ditangani di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, pemadaman udara, water bombing, patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Data ini menunjukkan bahwa penanganan di lapangan masih berlangsung, meskipun kondisi setiap provinsi berbeda.

Sementara itu, pada 11 Oktober 2026, BNPB melaporkan kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, menyebabkan jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II berada di bawah 1.000 meter pada sejumlah waktu pengamatan. Kondisi tersebut mengganggu penerbangan dan mendorong pemindahan sementara pusat operasi modifikasi cuaca ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, sejak 9 Oktober.

BNPB menyebut operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mendukung upaya kedatangan hujan di wilayah sasaran yang memiliki potensi pertumbuhan awan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan darurat, selain pemadaman langsung di lokasi kebakaran.

Di Riau, Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBD dan Pemadam Kebakaran pada 5 Oktober menyatakan titik karhutla yang sebelumnya aktif telah padam. Namun, kabut asap masih dilaporkan menyelimuti beberapa wilayah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam prakiraan cuaca periode 9–15 Oktober 2026, juga mengingatkan bahwa kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah. Pemantauan pada 7 Oktober mendeteksi

364 titik panas di Kalimantan dan 340 titik di Sumatera. Citra satelit turut menunjukkan sebaran asap di berbagai kawasan Indonesia.

Informasi BMKG menyebut bahwa kondisi kering dapat meningkatkan kerawanan karhutla, meskipun hujan masih berpeluang terjadi secara lokal di sejumlah wilayah. Data titik panas merupakan indikator potensi kebakaran, bukan dengan sendirinya bukti bahwa setiap titik merupakan kebakaran aktif.

Desak Status Bencana Nasional Jika Asap Tak Kunjung Hilang

Berkaca pada situasi tersebut, Wilson meminta Presiden Prabowo mengambil langkah lebih tegas apabila kabut asap tidak juga menghilang hingga akhir Oktober 2026.

Ia mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila skala kejadian dan dampak terhadap masyarakat, serta kapasitas penanganan daerah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Wilson, penetapan status tersebut harus diikuti langkah nyata, mulai dari penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengerahan sumber daya yang memadai, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, hingga perlindungan kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan, persoalan kabut asap bukan sekadar urusan pemadaman api, melainkan menyangkut keselamatan publik, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan lingkungan.

Forum Pimred Multimedia, lanjut Wilson, akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla sampai kabut asap benar-benar teratasi dan langkah pencegahan diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang.

“Jangan sampai masyarakat setiap tahun harus menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus memastikan penanganan dilakukan secara serius, transparan, dan menyentuh akar masalahnya,” tutup Wilson. ● (hmi)

MAN CITY VS PSG: DRAMA 6 GOL! LES PARISIENS MENANG 4-2

MANCHESTER |
Harian Merdeka

Paris Saint-Germain berhasil pulang dengan tiga angka dari markas Manchester City. Les Parisiens meraih kemenangan 4-2.

Manchester City vs Paris Saint-Germain pada laga lanjutan Liga Champions berlangsung di Etihad Stadium, Kamis (15/10/2026). PSG mengamuk di babak pertama dengan mampu bikin gol.

Tiga gol tim tamu dibuat oleh Desire Doue (menit ke-13'), Ousmane Dembele (15'), dan Vitinha (32'). Selepas jeda, Man City bisa menepis-kan ketinggalan dari gol Erling Haaland (53').

Namun, gol Magnes Aklouche (63') bikin PSG kembali menjauh. Brace Haaland (76') tak cukup menghindarkan Man City dari kekalahan.

PSG menang 4-2. Kemenangan ini bikin sang juara bertahan berada di puncak klasemen dengan enam angka. Man City di urutan ke-17 mengumpulkan tiga poin.

Jalannya Pertandingan Laga berjalan terbuka di awal laga. Les Parisiens berani mengimbangi permainan menyerang tuan rumah. PSG bahkan mampu men- curi gol pada menit ke-13.

Gol!!! PSG menyusun serangan dengan sangat baik dari sisi kanan. Bola dipindahkan ke sisi kiri oleh Fabian Ruiz menuju Desire Doue. Doue menyusuk ke tengah lalu melepaskan sepakan mendatar yang tak terbendung oleh Gianluigi Donnarumma.

Belum reda keterkejutan Man City dari gol Doue, PSG langsung kembali menekan. Mereka bisa bikin gol kedua tiga menit berselang.

Gol!!! Doue kembali tak terkawal dengan baik di sisi kiri. Kali ini, ia melepaskan umpan silang yang bisa ditanduk oleh Ousmane Dembele jadi gol di menit ke-15.

Man City yang tertinggal dua gol berusaha mengendalikan laga. Mereka memburu gol untuk menipiskan jarak di papan skor.

Erlang Haaland punya kesempatan di menit ke-25. Ia bisa menanduk umpan dari Antoine Semenyo. Sundulannya tapi belum menemui sasaran. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**